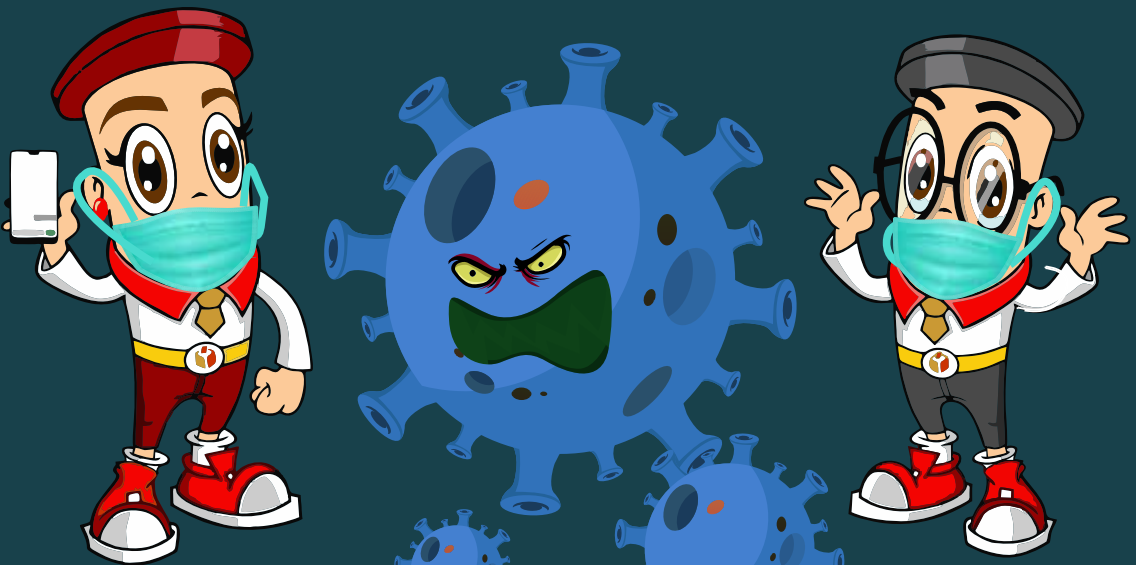


BULETIN DEMI PEMILU

EDISI **7** April - Juni 2020



MELAWAN COVID-19

ADAPTASI DENGAN COVID-19 DALAM PILKADA LANJUTAN

Sebagai lembaga negara, Bawaslu tidak hanya memastikan kualitas proses dan hasil dari pilkada saja, tetapi juga turut hadir dalam pencegahan Covid-19. Bawaslu memandang perlu membangun solidaritas dan bersatu agar menang dari virus yang kini telah menginfeksi sekitar 10 juta penduduk dunia.

Bawaslu menyadari banyak masyarakat yang terdampak Covid-19. Buruh pabrik menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tukang becak sepi, pedagang tradisional juga tak seramai biasanya. Hal ini masih ditambah dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah, disiplin jaga jarak dan tak menghindari dari kerumunan, menambah beban berat perjuangan untuk bisa menang melawan Covid-19.

Ini lah beberapa hal yang membuat Bawaslu Jatim saat merayakan hari ulang tahunnya pada 9 April 2020 dengan cara membangun solidaritas kemanusiaan untuk berjuang melawan Covid-19. Bawaslu mengetuk pintu langit lewat doa dan terus berikhtiar menebarkan manfaat di bumi.

Bawaslu membagi masker, sembako untuk yang membutuhkan, dan bahkan melakukan donor darah sebagai aksi kemanusiaan. Bawaslu ingin hadir dan turut meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat terdampak Covid-19.

Kini, pemerintah memang telah menerapkan new normal. Transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Kabupaten/Kota. Pemerintah tidak ingin terjebak pada pilihan menyelamatkan masyarakat dan ekonomi. Dua-duanya harus sama-sama dimenangkan dan dapat diraih.

Salah satu kebijakan pemerintah yang diambil di tengah pandemi adalah melanjutkan tahapan pilkada. Bawaslu Jatim berharap tidak ada kluster baru penularan Covid-19. Kita berharap tahapan pilkada akan berjalan dengan baik. Lancar secara proses di satu sisi, dan pada sisi yang lain juga berjalan dengan tetap menjaga kesehatan masyarakat.

Pilkada harus dijalankan secara ketat sesuai dengan protokol kesehatan. Walau tentu tantangannya akan semakin berat, sebab varian pelanggaran dan modus pelanggaran juga akan bertambah maju dalam situasi pandemi. Salah satunya yang disorot oleh Bawaslu adalah tentang bantuan sosial (bansos). Bahwa di saat situasi membutuhkan uluran kemanusiaan dengan tulus, ternyata masih ada saja oknum tertentu yang membuat kesempatan dengan cara memberikan bantuan demi kepentingan politik elektoral.

Bawaslu Jatim harus bekerja ekstra untuk melakukan pencegahan pelanggaran di 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, agar bansos tidak digunakan untuk kepentingan pilkada. Kita sedang berjuang bersama untuk menang dari Covid-19, bukan cari untung ditengah bencana non alam.

Buletin ini juga menggambarkan tentang bagaimana Bawaslu Jatim tetap merawat optimisme untuk bisa bekerja dengan baik. Pada hekekatnya, Bawaslu Jatim menjalankan kerja sesuai perintah regulasi dengan sebaik-baiknya dan se hormat-hormatnya.

Dengan memaksimalkan rapat, diskusi secara daring, Bawaslu Jatim sebenarnya telah beradaptasi untuk bisa berdampingan dengan Covid-19. Walaupun dalam tahapan tertentu, jajaran pengawas pemilu harus bertemu secara langsung dengan masyarakat, tapi tentu dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat demi menjaga keselamatan petugas dan pemilih.

Akhirnya, Buletin kali ini memang didesain cukup berbeda. Menyeimbangkan opini dengan berita. Hal ini agar menjadikan buletin ini lebih segar dan kontekstual.

**Salam Hormat,
Tim Redaksi**



DAFTAR ISI



1 KEKUATAN DARING DITENGAH PANDEMI



3 KILAS PENDIDIKAN KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF



6 BAWASLU GOES TO CAMPUS

SUSUNAN REDAKSI

Pengarah : Moh. Amin,
Aang Kunaifi, Totok
Hariyono, Nur Elya Anggraini,
Purnomo Satrio P,
Ikhwandudin Alfianto, Eka
Rahmawati.

Penanggung jawab :

Sapni Syahril

Tim Penulis :

Hasyim Wahid,
Dwi Endah Prasetyowati,
M. Alfianto,

Titin Wahyuningsih,
Taufiqil Aziz,

Desain Grafis :

Amryzal Perdana

Fotografer :

Ilham Bagus Priminanda,
Krisna Andika T

Sirkulasi : Tangguh Gradhianta,
Royin Fauziana

Redaktur : Nur Elya Anggraini

jatim.bawaslu.go.id

@bawaslujatim

@bawaslujatim

Bawaslu Jatim

Bawaslu Jatim

10

Peluncuran
Pojok
Laktasi

11

Harlah
Bawaslu

12

Ada Tambang
dalam Pilkada

15

Jeda dan Aktif
Lagi Panwaslu
Ad Hoc saat Pandemi

17

Pilkada Dan
Optimisme
Di Tengah
Pandemi

19

Pilkada Dan
Anak Lembu
Yang
Terbelenggu

21

"Srikandi"
Wanita Tangguh
Pengawal
Demokrasi
Indonesia

24

Menjalani Titah
Megang Amanah
Penyelenggara
Pemilu
Maslahatul Ummah

Kekuatan Daring di Tengah Pandemi

“Sistem daring saat ini sangat berpengaruh penting bagi lembaga Bawaslu ditengah pandemi wabah corona ini. Bawaslu se-Jawa Timur dapat tetap menjalankan tupoksinya

Siapa akan menyangka wabah Covid-19 atau lebih terkenal dengan sebutan virus corona yang berasal dari Wuhan bisa sampai ke Indonesia. Siapa juga yang mengira pandemi ini akan menjadi bencana nasional di negara Indonesia bahkan seluruh dunia. Menginfeksi ribuan manusia, menular dengan cepatnya bahkan memakan korban jiwa yang tidak sedikit jumlah tanpa melihat kasta.

Berimbas pada kegiatan sehari-hari, bahkan melumpuhkan perekonomian dari berbagai sektor. Aturan-aturan telah dibentuk dan ditelaah oleh Pemerintah demi mendapatkan solusi terbaik, untuk memutustali penyebaran virus corona.

Merebaknya jumlah yang terinfeksi covid-19 sampai tembus angka 15.438 di Indonesia, direspon oleh banyak Kepala Daerah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti sekolah dari rumah, bekerja dari rumah bahkan beribadah dari rumah. Hal tersebut menjadi bagian dari jaga jarak fisik guna memutus penyebaran virus corona.

Seperti yang diinstruksikan oleh Presiden RI Joko Widodo, sekolah dirumah bukan berarti diliburkan, begitu pula dengan pekerja. Melainkan masih menjalankan kegiatan seperti aktifitas biasa dengan mengalihkan ke



metode daring.

Dampak dari wabah pandemi covid-19 ini berimbas pula di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jawa Timur. Jajaran Bawaslu se-Jawa Timur tidak dapat bekerja seperti rutinitas sebelumnya. Banyaknya agenda yang tertunda karena dampak dari virus Covid-19. Bawaslu Jawa Timur memiliki cara baru untuk melakukan monitoring terhadap seluruh jajaran Bawaslu di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, pasca Surat Edaran (SE) dari Bawaslu RI tentang pencegahan penyebaran Covid-19. Cara baru yang dimaksud adalah telekonferensi dengan seluruh jajaran Bawaslu se-Jawa Timur.

Sejak tanggal 23 Maret 2020, Bawaslu menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah. Karena tidak ingin kinerja semakin terhambat, jajaran Bawaslu se-Jawa Timur mengalihkan seluruh kinerjanya menggunakan metode daring. Mulai dari kegiatan rapat koordinasi hingga kegiatan sosialisasi. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan secara daring yaitu Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang melibatkan masyarakat umum untuk belajar tentang pengawasan dan kepemiluan. Baru-baru ini dimulai dan diikuti sebanyak 20.055 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Begitu pula tahapan-tahapan persiapan Pemilihan Kepala Daerah di 19 Kabupaten/Kota yang awalnya di gelar pada 23 September 2020 terpaksa ditunda hingga 9 Desember 2020. Namun, segala macam bentuk pengawasan masih tetap dilaksanakan seperti biasa. Meski lewat video conference atau daring, diharapkan Bawaslu dapat maksimal dalam melaksanakan tugas pengawasan. Karena ditengah pandemi ini banyak Kepala Daerah yang turun tangan untuk membagikan bantuan. Tidak menutup kemungkinan disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas dalam pilkada 2020.

Nur Elya Anggraini, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sekaligus Koordinator Divisi Hubungan

Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga, salah satu komisioner yang aktif dalam mengadakan pertemuan-pertemuan dalam bentuk daring. Program yang berada dibawah divisinya selalu aktif mengabarkan dan menginformasi dengan berbagai macam kegiatan virtual. Semisal, program Ngabuburit Online yang dilaksanakan setiap hari Rabu selama bulan Ramadan. Tujuan program ini memberikan kelas-kelas online penulisan berita bagi kehumasan Bawaslu se-Jawa Timur.

Bagi Ely, ditengah pandemi seperti ini bukan berarti menghambat kinerja dan kreatifitas seseorang. Hal tersebut merupakan tantangan untuk menciptakan program-program inovasi yang dapat dilakukan melalui video conference. WFH pun tidak akan terasa dan rutinitas dapat berjalan seperti biasa.

Ely juga aktif dalam bermitra dengan kampus-kampus yang ada di Jawa Timur melalui siaran langsung baik di media sosial, youtube bahkan video conference. Baginya, kegiatan tersebut merupakan bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif bagi masyarakat luas. Karena video conference dapat diakses oleh masyarakat luas.

Sistem daring saat ini sangat berpengaruh penting bagi lembaga Bawaslu ditengah pandemi wabah corona ini. Bawaslu se-Jawa Timur dapat tetap menjalankan tupoksinya. Bekerja dari rumah dengan bantuan internet dapat memudahkan jajaran Bawaslu berkoordinasi baik dengan Bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sesama jajaran Bawaslu lainnya. Ditengah pemutusan rantai penyebaran covid-19 Bawaslu tetap hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahkan himbauan tentang pengawasan kepemiluan.





“Sebagaimana dendam, rindu juga harus dibayar dengan tuntas. Sebagaimana itupula kerja harus ditunaikan dengan se hormat-hormatnya. Di tengah tahapan ditunda dan pandemi, Bawaslu mengadakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) via daring. Bagaimana perjalannya? Berikut liputannya

Diserbu Pendaftar

de dan kreativitas bersekala besar lahir dari Bawaslu. Untuk pertama kalinya mengadakan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) secara daring. Tidak ada yang menduga, bahwa SKPP daring pertama ini diserbu oleh pendaftar. Untuk seluruh Indonesia berjumlah 20.665. Sementara untuk Jawa Timur terdiri dari 2.464 peserta. Rata-rata pendaftar berusia antara 20-24 tahun.

Usia muda dengan balutan idealisme dari peserta menjadi modal penting untuk mengawasi Pilkada. Kepala Sekolah SKPP Jatim, Nur Elya Anggraini berharap, calon peserta dari anak muda yang melek terhadap teknologi lalu didukung oleh kemampuan secara teoritis dan praktis dalam mengawasi setiap momentum Pemilu akan merawat demokrasi dengan lebih kreatif dan inovatif.

“Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Anak muda itu biasanya memiliki cara baru untuk menyalurkan aspirasinya. Misalnya dengan bermain di tagar di media sosial atau gerakan lainnya dengan menggunakan teknologi. Kalau kita bekal dengan seperangkat skill untuk



PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI TENGAH PANDEMI



Dibuka Saat Hardiknas

mengawasi demokrasi, tentu ini akan menjadi wajah baru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat”, terang Ely.

Bawaslu Jatim membuka SKPP daring pada 2 Mei 2020 bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Ketua Bawaslu Jatim menyebut, bukan suatu kebetulan belaka saat SKPP dibuka bersamaan dengan hardiknas. “Kita akan mengambil ghirah dari pendidikan nasional”, terang Amin via online pada tanggal 2 Mei.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan AntarLembaga, Nur Elya Anggraini yang menjadi penanggung-jawab dari Bawaslu Jatim untuk SKPP Daring menjelaskan tentang sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh peserta agar bisa lulus.

“Nanti setiap peserta harus mengikuti E-Learning, Webkusi, dan ujian online”, ujarnya via online.

Dalam E-Learning menurut Ely, Bawaslu telah menyediakan sejumlah materi dalam bentuk audio



Magister Pendidikan Islam tersebut juga memberikan makna tersendiri tentang pendidikan proses demokrasi. Bagi Amin, pendidikan adalah proses pendewasaan. Dari tidak dewasa menuju dewasa. Sebagaimana halnya dengan demokrasi.

“Ibarat dengan padi, semakin lama kian menunduk. Tambah dewasa. Termasuk juga proses kita dalam berdemokrasi”, tambahnya.

Amin berharap bahwa peserta SKPP memiliki komunitas, organisasi dan lembaga. Ilmu-ilmu yang didapat dalam SKPP diharapkan juga ditularkan kepada lingkungan sosialnya. “Dengan menularkan ilmu tentang pengawasan ini, kita akan semakin bermanfaat terhadap sekitar kita”, tambahnya.

Tahapan SKPP

visual dengan 9 topik besar. Setiap peserta harus benar-benar menyimak terhadap materi yang disampaikan. Tahapan ini akan berlangsung dari tanggal 5 sampai 30 Mei 2020.

“Kami akan kembali melakukan seleksi tentang peserta yang benar-benar mengikuti atau tidak. Karena diakhir ada ujiannya. Nanti akan kami seleksi yang lolos atau tidak untuk tahapan selanjutnya”, ungkapnya.

Tahapan selanjutnya adalah dengan mengikuti Webkusi antara pemateri dengan peserta. Hal ini untuk menjawab setiap pertanyaan peserta selama E-Learning. Tahapan ini akan dilaksanakan pada tanggal 1-15 Juni 2020. “Nanti tahapan ini akan diisi oleh Bawaslu Provinsi dan dibantu oleh Kabupaten/Kota untuk saling sharing tentang

materi yang telah dijelaskan dalam E-Learning”, tambah Ely.

Pada bagian akhir, Bawaslu akan mengadakan ujian online. Menurut Ely, Bawaslu telah menentukan standar kelulusan minimal peserta. “Semua sistem online telah dibangun oleh Bawaslu RI. Saya kira peserta akan mendapatkan banyak ilmu yang barangkali tidak akan didapatkan dibangku kuliah atau ditempat kerja”, terangnya.

Pembukaan berlangsung secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk Pengawas Pemilu se-Jawa Timur, akun youtube dan instagram untuk peserta. Dalam pantauan, setidaknya pembukaan tadi diikuti oleh 2000 peserta secara online.

1.696 Peserta SKPP Jatim Lulus Pembelajaran Audio Visual

Setelah mengikuti tahap E-Learning berupa pembelajaran via audio visual, sebanyak 1.696 peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dari Jawa Timur dinyatakan lulus dan bisa mengikuti rangkaian tahapan kedua berupa Webkusi dengan komisioner Bawaslu di Jawa Timur. Sementara 375 lainnya dinyatakan tidak lulus.

Tahap Webkusi menurut Kepala Sekolah SKPP Jatim, Nur Elya Anggraini merupakan memungkinkan dialog antara peserta dengan Bawaslu.

“Barangkali ada pemaparan yang belum tuntas di tahap audio visual, nanti bisa ditanyakan dan didiskusikan secara langsung dengan komisioner di lingkungan Jawa Timur sehingga bisa lebih paham terhadap keseluruhan materi,” tutur Ely.

Bangun Gedung Virtual

Demi memaksimalkan pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) daring, Bawaslu Jatim telah membangun gedung virtual untuk seluruh peserta SKPP. Gedung tersebut sebagai suplai materi gratis untuk seluruh peserta agar pemahaman tentang dunia pengawasan semakin kuat.

Nur Elya Anggraini menyampaikan bahwa peserta SKPP dapat memanfaatkan sebaik-baiknya gedung virtual yang telah dibangun oleh Bawaslu Jatim. “Ayo kita kunjungi gedung virtual ini. Terutama untuk peserta SKPP. Berguna untuk menopang proses belajarnya di SKPP daring,” tuturnya.

Masih menurut Ely, gedung virtual berisi dengan referensi yang dibutuhkan oleh peserta SKPP. Baik itu berupa video, power point, buku, dan buletin yang diterbitkan oleh Bawaslu Jatim.

“Kalau Sahabat Bawaslu buka pintunya, akan bertemu dengan video pembelajaran, power point materi pembelajaran, buku-buku, buletin-buletin dan 'dosen pengampu',” terangnya via Whatsap Group.

Dalam pantauan, gedung virtual memiliki 39 buku, 35 power point, 6 buletin, dan 48 pembelajaran dengan video. Gedung virtual berada di alamat <http://skpp.jatim.bawaslu.go.id/>.



MODAL, MODEL DAN MODUL BAWASLU JATIM GOES TO CAMPUS

Tak perlu rumit dan birokratis untuk mengunjungi kampus di Jawa Timur. Karena dengan cara yang sederhana dan substansial, Bawaslu Jatim selama pandemi, hampir tiap pekan mengunjungi kampus secara daring. Tak bisa menggunakan Zoom, menggunakan medsos pun tak jadi soal. Bagaimana keseruan ceritanya? Berikut liputannya.



Apapun Sarananya, Pengawasan Partisipatif Tujuannya

Apapun sarana yang digunakan, Bawaslu Jatim terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Belum cukup dengan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) Daring, kali ini Bawaslu Jatim melakukan Goes to Campus secara daring pula. Yang dimasuki adalah kelompok mahasiswa. Materi yang disampaikan berkenaan pengawasan partisipatif.

Selasa (05/05), Bawaslu Jatim telah selesai mengunjungi via daring terhadap mahasiswa di STKIP Bangkalan dan INSTIKA-IST Annuqayah.

Lewat media daring, Nur Elya Anggraini mengisi materi kepada mahasiswa dua perguruan tinggi yang ada di Madura tersebut. Di STKIP Bangkalan dilaksanakan sore hari jelang buka puasa. Yang INSTIKA-IST dilaksanakan selepas tarawih, jam 20.00.

Tak dinyana, antusiasme peserta cukup tinggi. Para mahasiswa juga memiliki kegelisahan yang sama tentang politik uang, serangan fajar, posisi penyelenggara pemilu, dan keinginan mengawal pilkada walau masih belum tahu jalurnya.

"Seru dikusinya. Mereka memiliki kegelisahan yang sama tentang Pilkada. Inilah saatnya kami ajak untuk bersama sama mengawasi jalannya Pilkada," terang Ely via online.

Yang menarik, adalah saat salah satu mahasiswa juga bertanya tentang legal standing Bawaslu dalam Pilkada dan kegelisahan bahwa ada permainan elite politik untuk mengontrol dan mempengaruhi penyelenggara pemilu.

Nur Elya lalu menjawabnya bahwa berdasarkan keputusan MK nomor 48 bahwa Panwaslu adalah Bawaslu untuk Pilkada. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa penyelenggara pemilu

dituntut untuk berintegritas. Karena Bawaslu sendiri tidak hanya mengawasi pelanggaran administrasi dan pidana saja dari peserta pemilu. Namun harus menerapkan kode etik yang baik.



Karena saat keluar dari kode etik, maka baik Bawaslu maupun KPU akan juga diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Makanya tugas kita semua. Terutama mahasiswa untuk mengawasi proses pilkada. Kalau ada oknum penyelenggara yang melanggar misalkan, ya dilaporkan. Ada pelanggaran administratif dari peserta, ya laporkan," tambahnya.

Dalam diskusi yang seru dan berlangsung selama dua jam, Ely berharap bahwa mahasiswa mewujudkan perannya sebagai agen perubahan dengan melakukan pengawasan partisipatif dengan baik.

Live Instagram dengan Mahasiswa UTM

Sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Bawaslu Jatim Goes to Campus ke Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dilakukan dengan live instagram (IG) pada jum'at (08/05). Sekali lagi Bawaslu Jatim membahas pengawasan partisipatif.

Ternyata saat live IG, bukan hanya diikuti oleh mahasiswa UTM saja, tetapi juga pengguna media sosial dari Jakarta, Kalimantan, Lampung, Jawa Tengah dan juga akun Instagram Seknas JPPR. Jadilah live instagram menjadi seru dengan komentar peserta. Tidak kurang dari 100 peserta mengikuti live Instagram Bawaslu Jatim.

Keseruan jadi bertambah, saat selama live instagram, 2 kali gangguan sinyal yang menyebabkan dua kali juga berhenti. Namun antusiasme peserta untuk ikut komentar dan memberikan pertanyaan tampak terlihat selama live di instagram.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Nur Elya Anggraini mengajak mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Trunojoyo untuk menjadi pengawas partisipatif.

"Mahasiswa adalah kelompok idealis yang kritis. Untuk itu, kami mengajak mahasiswa di UTM untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. Mengawasi jalannya proses pilkada," terang Ely yang tampak memakai masker.

Menurut Ely tantangan demokrasi yang dihadapi ke depan akan tambah kompleks. Mulai politik uang, politisasi SARA dan juga pelanggaran lainnya lewat media sosial.

"Mahasiswa di UTM ini bisa ambil peran dan merebut perubahan dalam setiap momentum demokrasi yang ada di Indonesia. Bisa lewat media sosial maupun juga langsung terlibat dalam pengawasan partisipatif," pungkasnya.

Ely berharap bahwa mahasiswa di UTM menularkan semangat pengawasannya kepada organisasi, lembaga dan lingkungan sekitarnya demi demokrasi yang lebih baik.

Kunjungi Ubhara dengan Zoom

Anggota Bawaslu Jawa Timur, Totok Hariyono mengunjungi Universitas Bhayangkara (Ubhara) via daring senin (18/05). Sebagai bagian dari agenda Bawaslu Jatim Goes to campus, Totok menjelaskan tentang dinamika penegakan hukum pemilu dan pilkada sepanjang sejarah di Indonesia.

Menurut Totok, ada tiga fase penegakan hukum pemilu dan pilkada. Yakni pada masa orde lama, orde baru dan reformasi. Kewenangan Bawaslu semakin kuat setelah reformasi. Awalnya hanya mengawasi dan merekomendasikan setiap pelanggaran, Bawaslu menurutnya dengan Undang Undang nomor 7 tahun 2017 memiliki kewenangan untuk memutuskan pelanggaran pemilu.

"Sekarang jelang Pilkada, Bawaslu bekerja dengan sesuai dengan Undang Undang 10/2016 yang kewenangannya ada sebagian yang berbeda dengan Undang Undang 7/2017," terangnya.

Menurut Totok, dinamika penegakan hukum pemilu dan pilkada serta perjalanan Bawaslu sepanjang sejarah yang terus mengalami penguatan tidak bisa dipisahkan dari keinginan masyarakat dan sejumlah pihak yang ingin mendapatkan keadilan dalam pemilu dan pilkada.

"Kewenangan Bawaslu yang semakin diperkuat oleh undang undang ini dikarenakan ada kepercayaan terhadap Bawaslu sebagai pengadil pemilu dan pilkada. Tagline kami adalah bersama rakyat awasi pemilu dan bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu," tuturnya.

Pada sisi lain, respon dari peserta diskusi dari Universitas Bhayangkara ternyata cukup baik. Kegelisahan tentang hukum, pemilu dan pilkada ditumpahkan dalam diskusi daring. Ada mahasiswa yang bertanya tentang peran peradilan lain yang bisa memutuskan pelanggaran pemilu, posisi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ada pula mahasiswa Ubhara yang sekaligus kini menjadi penyelenggara ad hoc di Surabaya melihat pergeseran suara pada pemilu tahun 2019.

Totok dengan telaten membersamai diskusi daring menjawab satu persatu gelisah dari mahasiswa di Universitas Bhayangkara Surabaya. Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu akan terus menegakkan keadilan pemilu dan pilkada dengan sebaikbaiknya.

Berselancar di Media Sosial dengan Untag Surabaya

Pembatasan sosial melahirkan kreativitas bersekala besar di media sosial. Anggota Bawaslu Jatim, Purnomo Satrio Pringgodigdo bersama dengan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya berselancar di dunia hukum lewat akun instagram resmi Bawaslu Jatim, senin sore (11/05).

Dunia hukum, pasal dan segala perubahannya menjadi ringan saat dibawa oleh Purnomo ketika

mengajak netizen untuk berselancar menikmati perubahan regulasi Pemilu dan Pilkada, penanganan administrasi Pemilu dan Pilkada, penanganan pelanggaran pidana Pemilu dan Pilkada, penyelesaian sengketa dalam Pemilu dan Pilkada.

"Kami di Bawaslu merasa kewenangan kami bertambah lewat Undang-Undang 7/2017 dalam melakukan proses terhadap penindakan administrasi Pemilu. Hal ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang 10/2016 tentang Pilkada", demikian kata Purnomo dalam salah satu penyampiannya.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya ini juga menyebutkan bahwa terjadi perubahan regulasi Pilkada dan Pemilu selalu berubah dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

"Perubahan regulasi ini tidak terlepas dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki bab khusus tentang Pemilu yang mengatur setidaknya 6 hal. Salah satunya tentang Pemilu yang mengamatkan untuk pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD. Teman teman barangkali ingat tentang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membedakan antara rezim Pemilu dan pemerintah daerah. Salah satunya berdasarkan ayat ini", ujar Purnomo.

Beberapa komentar di atas hanya beberapa mozaik dari seluk beluk hukum Pemilu dan Pilkada yang dibahas oleh Purnomo. Hari ini, lewat akun Bawaslu Jatim, Purnomo akan kembali live instagram jam 16.00 dengan secara spesifik membahas tentang penanganan pelanggaran administrasi Pemilu dan Pilkada.

Dialog Kritis dengan Mahasiswa Universitas Jember

Bawaslu Jatim juga mengunjungi Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) via daring, Rabu (13/05). Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi yang di dapuk sebagai narasumber berdialog kritis dengan mahasiswa.

Mulai jam 10.00 Bawaslu Jatim berdialog dengan mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Hukum

UNEJ. Aang menjelaskan dengan luhur tentang Pemilu dan Pilkada dari masa ke masa. Kewenangan Bawaslu yang terus tumbuh dan semakin kuat dari waktu ke waktu.

Magister Hukum ini mengajak mahasiswa UNEJ untuk mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi dalam perbaikan demokrasi. Baik itu pendidikan, penelitian dan pengabdian.

Dalam dialog, mahasiswa UNEJ atas nama Vicko Taniady asal Sumatera Utara menyoroti tentang politik uang yang terjadi dalam dinamika politik di tingkat lokal yang dilakukan dengan banyak modus. Ia mempertanyakan peran Bawaslu.

Menanggapi ini, Anggota Bawaslu termuda ini menyampaikan bahwa Bawaslu Jatim menindaklanjuti setiap laporan tentang politik uang di masyarakat. "Memang ada syarat materiil yang harus dipenuhi dalam laporan tentang politik uang. Tetapi jangan pesimis. Pengawas Pemilu akan bekerja ekstra untuk mencegah politik uang", jawabnya

Bawaslu Jatim menurut Aang juga kini sedang fokus dalam pencegahan politisasi bansos yang dilakukan oleh oknum tertentu demi kepentingan elektoral. "Jajaran kami sudah mengirim surat ke pemerintah daerah dan pimpinan partai politik untuk tidak melakukan politisasi bansos. Ada 5 daerah di Jawa Timur yang kami duga menggunakan bansos demi politik elektoral", terang Aang

Seorang mahasiswa lain atas nama Faza, mengungkapkan kegelisahannya tentang napi korupsi yang masihizinkan berkontestasi dalam politik. Padahal menurutnya, napi korupsi berbahaya bagi masa depan demokrasi. Aang menanggapi bahwa Bawaslu tidak ingin mencabut hak politik setiap warga negara.

"Bawaslu melihat bahwa mereka juga punya hak konstitusional yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, kami melihat sepanjang tidak ada Undang-Undang atau keputusan Mahkamah Konstitusi maka setiap warga negara memiliki hak asasi untuk dipilih dan memilih", jawab Aang.

Diskusi tambah seru manakala seorang mahasiswa yang bernama Nova Fajar Hariyanto kritis terhadap kelembagaan Bawaslu. Menurutnya, kewenangan Bawaslu berpotensi tumpang tindih dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan sama. Seperti kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

"Apakah ini tidak perlu dievaluasi bapak. Soalnya tumpang tindih kewenangannya. Apa perlu ada peradilan khusus Pemilu?", tanya Nova.

Aang menjabarkan bahwa kewenangan Bawaslu memang sudah bertambah. Namun ada beberapa peran yang tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan pihak lain.

"Kejaksaan dan kepolisian kami libatkan dalam pidana Pemilu. Karena kami di Bawaslu belum memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Itu wilayah polisi. Kewenangan untuk melakukan penuntutan itu wilayah kejaksaan. Maka disini Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menindak pidana".

Aang juga menyinggung tentang proses penyelesaian administrasi. "Dalam penyelesaian administrasi Pemilu dan Pilkada harus melalui Bawaslu. Kalau misalnya tidak puas maka bisa diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara", terangnya

Mengenai kelembagaan ini, Fenny yang memandu diskusi dan sekaligus dosen di Fakultas Hukum juga memberikan pandangan bahwa di Prancis dan Brazil menurutnya juga ada kelembagaan yang memang memutuskan pelanggaran Pemilu. Namun ada yang bersifat langsung mengikat, ada pula yang bisa diteruskan ke lembaga yang lain.

"Kita di Indonesia memang unik. Ya begitulah Bawaslu. Memiliki kewenangan untuk memutuskan, namun bisa diajukan banding ke lembaga lain", terang Fenny.

Tidak terasa, diskusi telah berlangsung hampir dua jam. Pertemuan via daring harus diselesaikan sekitar pukul 12.00 WIB.



TEGUHKAN KOMITMEN KEBERPIHAKAN, **BAWASLU SE-JATIM** LUNCURKAN POJOK LAKTASI

“

Meskipun dengan kondisi yang masih serba terbatas di masa pandemi covid-19, peluncuran pojok laktasi dan ruang ramah anak tetap disiapkan secara optimal oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur



Peringatan hari kartini tahun 2020 tampak beda. Tidak hanya memakai pakaian nasional kebaya bagi para srikandi, para pimpinan Bawaslu Jawa Timur bersama pimpinan Bawaslu RI meluncurkan pojok laktasi dan ruang ramah anak yang berada di setiap kantor Bawaslu se-Jawa Timur. Pojok laktasi ditujukan sebagai ruang bagi para ibu untuk menyusui anak-anaknya sehingga para ibu di jajaran Bawaslu se-Provinsi Jawa Timur tetap bisa menyusui anaknya saat bekerja di kantor. Bisa juga dipakai oleh masyarakat yang sedang berkunjung ke kantor Bawaslu.

Selain untuk ruang menyusui, pojok laktasi juga bisa digunakan sebagai ruang ramah anak. Anak-anak yang terpaksa ikut ke kantor Bawaslu karena orang tuanya harus bekerja, bisa bermain dan belajar di ruang ini.

Peluncuran pojok laktasi dan ruang ramah anak ini dilaksanakan pada Selasa (21/4/2020). Ketua Bawaslu RI, Abhan menjadi pembuka acara yang juga diikuti oleh seluruh anggota Bawaslu RI secara terpisah. Peresmian dilakukan secara daring (online) menggunakan aplikasi zoom. Peluncuran secara daring dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19.

Abhan menyampaikan bahwa peresmian pojok laktasi dan ruang ramah anak merupakan upaya dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan jajarannya untuk menghargai peran perempuan sebagai ibu. Pojok laktasi merupakan ruangan khusus yang disediakan oleh Bawaslu untuk menjaga privasi para ibu yang menyusui saat bekerja.

“Melalui peringatan hari Kartini, peluncuran pojok laktasi dan ruang ramah anak ini diharapkan



bisa ada di semua kantor Bawaslu kabupaten maupun kota,” harapnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengapresiasi peluncuran pojok laktasi dan ruang ramah anak. Ia juga menambahkan bahwa pojok laktasi dan ruang ramah anak merupakan bentuk penghormatan kepada peran perempuan yang menjadi pegawai dan penyelenggara pemilu di Bawaslu.

“Pojok laktasi menjadi bukti dukungan Bawaslu pada peran perempuan di ruang publik saat bekerja dengan memberikan privasi saat menyusui,” tuturnya.

Ia juga bercerita bahwa peluncuran pojok laktasi dan ruang ramah anak merupakan ide yang sudah sering dibahas dengan dua srikandi Bawaslu Jawa Timur (Eka Rahmawati dan Nur Elya Anggraini, red.). Setelah sekian lama, peluncuran pojok laktasi dan ruang ramah anak bisa diwujudkan berbarengan dengan peringatan hari Kartini.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Moh. Amin berharap agar peluncuran pojok laktasi bisa benar-benar bermanfaat. Pojok laktasi dan ruang ramah anak merupakan bentuk komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam menjunjung peran



perempuan dalam demokrasi.

“Meskipun dengan kondisi yang masih serba terbatas di masa pandemi covid-19, peluncuran pojok laktasi dan ruang ramah anak tetap disiapkan secara optimal oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur,” jelasnya.

“

Pojok laktasi menjadi bukti dukungan Bawaslu pada peran perempuan di ruang publik saat bekerja dengan memberikan privasi saat menyusui



HUT KE-12 BAWASLU “BANGUN SOLIDARITAS KEBANGSAAN MELAWAN COVID-19”

“
**DIRGAHAYU
Bawasluku!**”

Pandemi Covid-19 mengubah segalanya. Ia mempengaruhi hidup keseharian kita, menguji daya tahan dan *imunitas* tubuh kita. Ia juga menguras tenaga dan pikiran kita di antara ketakutan untuk mencari cara agar terhindar dari infeksi, maupun kecemasan seberapa lama kita bisa bertahan atas situasi sulit yang ditimbulkannya.

Covid-19 mempengaruhi bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, termasuk keharusan *menata-laksana* ulang bagaimana cara-cara kita untuk bekerja. Pada masa Pandemic Covid-19, pekerjaan dan cara-cara kerja “*konvensional*” menjadi terganggu. Tidak bisa lagi dilakukan seperti biasanya dan karenanya harus ditanggalkan. Jika hari-hari biasa kita bisa berinteraksi dengan siapapun hampir tanpa batas. Maka di masa Covid-19 ini justru menjadi sebaliknya.

Terhadap sesama rekan kerja atau kolega, diantara pimpinan atau bawahan, dengan *stakeholder*, atau dengan publik pada umumnya. Bahkan di antara keluarga sendiripun, interaksi menjadi sangat hati-hati dan serba dibatasi. Begitulah wajah dunia akibat virus corona.

Sebagai lembaga publik yang hirarkis di bawah

Bawaslu RI, Bawaslu Jatim tentu harus tetap menjalankan roda organisasi sesuai garis perintah pimpinan. Tanggap darurat Covid-19 diterapkan. Work from Home dijalankan. Dan sebagian program dan kegiatan harus di re-schedule dan re-orientasi ulang. Pendek kata, apapun kegiatan yang dijalankan, harus memenuhi dan menaati Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.

Kebetulan di tahun 2020 ini Bawaslu tengah berulang-tahun ke-12. Tanggal 9 April diperingati sebagai hari lahir (HUT) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagaimana lazimnya diri dan institusi, kamipun harus tetap memperingatinya sebagai wujud rasa bersyukur. Namun karena dalam situasi wabah dan bencana, peringatan kali ini digelar tidak seperti biasa.

Jadilah harlah ke-12 diperingati tanpa euforia. Di tengah tidak menentunya suasana darurat pandemic Covid-19, peringatan harlah digelar secara khusus pula. Itupun dengan keharusan menunjukkan empati dan kepekaan atas wabah dan bencana. Yakni dengan fokus do'a atau dzikir memohon keselamatan kepada Tuhan YME, serta berbagai kegiatan lain berupa bakti social sebagai wujud peduli sesama.

Dzikir dan Baksos Terdampak Covid-19

Puncak harlah digelar Kamis (9/4/2020) dengan tema "Bangun Solidaritas Kebangsaan Melawan Covid-19". Sesuai instruksi dari Bawaslu RI, bentuk kegiatan peringatan harlah kali ini memang dibuat sederhana namun bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat yang tengah dalam suasana prihatin akibat wabah corona. Pesertanya pun terbatas, dan dengan keharusan menerapkan physical distancing dan protocol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Rabu, 8 April 2020 Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin memimpin rapat koordinasi membahas persiapan akhir harlah. Tentu dengan cara daring melalui video conference. Seluruh ketua dan kordiv SDM Organisasi di 38 Bawaslu kabupaten/kota dilibatkan. Persiapan di cek list satu-persatu secara detail.

Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin saat membuka vidcon menjelaskan, ada 3 kegiatan utama yang akan dilaksanakan serentak oleh Bawaslu se-Jawa Timur, yakni do'a bersama, bakti sosial dan donor darah. Hal mana menyesuaikan dengan tema utama peringatan HUT Bawaslu yakni "Bangun Solidaritas Kebangsaan Melawan Covid 19". Sebagai wujud peran aktif jajaran Bawaslu dalam turut mencegah

dan memerangi wabah corona. "Kita lakukan segala upaya agar kita bisa bersama-sama, bersatu melawan covid 19. Kita mengetuk pintu langit dengan doa-doa, kita juga melakukan ikhtiar kemanusiaan melalui donor darah dan bakti sosial," jelas Amin.

Anggota Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini menyampaikan bahwa meski tanpa euforia, acara peringatan HUT Bawaslu Ke-12 tetap bisa ditampilkan secara luas dan dinikmati publik. Masyarakat bisa mengikuti melalui seluruh platform medsos Bawaslu seperti Channel Youtube, IG, Facebook atau Fanpage, Twitter maupun laman resmi (website).

"Peringatan ulang tahun dimulai pukul 09.00 WIB. Salah satu seremoni yang dilakukan adalah pemakaian masker secara serentak oleh semua anggota Bawaslu seluruh Indonesia. Tentu, ini dilaksanakan secara simbolis melalui video conference", jelasnya.

Peringatan harlah ke-12 Bawaslu kali ini terasa khidmad, lain dari biasanya, tetapi terasa istimewa. Diawali dengan istighosah dan do'a bersama, dilanjutkan dengan berbagai kegiatan bakti sosial



seperti pembagian masker, hand sanitizer dan paket sembako sebagai wujud peduli pada sesama. Tak terpisah dari rangkaian kegiatan adalah donor darah masal jajaran Bawaslu Provinsi Jatim dan kabupaten/kota se-Jatim.

720 Kantong Darah Berhasil Disumbangkan

"Setetes darah Anda menyelamatkan sesama", inilah sepenggal jargon yang banyak dikenal dan akrab di lingkungan pekerja kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI). Di puncak harlah ke-12 ini Bawaslu se-Jawa Timur melakukan aksi donor darah bekerja sama dengan PMI di wilayah masing-masing yang dilakukan di lokasi kantor di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Ketua Bawaslu Jatim, Moh Amin menuturkan bahwa kegiatan donor darah oleh pengawas pemilu memang dimaksudkan untuk membantu menjamin ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena menurutnya, ketersediaan darah di Jatim saat itu telah menipis.

"Sebagaimana arahan Gubernur Jawa Timur, bahwa ketersediaan darah harus terjaga untuk seluruh masyarakat yang membutuhkan. Terutama untuk melawan persebaran covid-19 ini. Bawaslu se Jawa Timur dihari 12 tahun Bawaslu, melakukan donor darah untuk berpartisipasi membantu terjaminnya ketersediaan darah," terang Amin, via saluran Whatsap.

Pada saat itu, Amin sendiri langsung turun langsung di awal untuk melakukan donor darah yang juga diikuti oleh 38 Kabupaten/Kota lainnya yang melakukan aksi serupa. Antusiasme pendonor memang cukup tinggi. Menjadi surprise yang luar biasa. Dari kegiatan donor darah ini telah terkumpul 720 kantong.

"Kami ingin memberikan sumbangsih yang bisa dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar sesama anak bangsa dalam menghadapi wabah ini," tambah Amin.

Tentu tidak hanya aksi donor darah. Bawaslu se-Jawa Timur juga melakukan serangkaian kegiatan



aksi sosial memberikan alat kesehatan dan paket sembako. Setidaknya 7.332 masker gratis, 1.119 handsanitizer, 291 sabun cuci tangan, 26 bak cuci tangan, 1.599 paket sembako, 200 paket vitamin, 40 bungkus nasi kotak, dan juga 50 paket jamu tradisional.



ADA TAMBANG DALAM PILKADA?

Kartel oligarki mengintai dalam setiap pilkada. Dugaan ijon politik tambang selalu mencuat. Peserta pilkada perlu modal untuk berkontestasi, dan pengusaha tambang butuh perizinan. Bawaslu Jatim telah melakukan kajian mendalam pada tanggal 08 Juni 2020 sebagai untuk pencegahan pelanggaran dalam laporan dana kampanye. Apa saja yang dibahas? Berikut liputannya.



Pengakuan Bupati Lumajang

Bupati Lumajang, H Thoriqul Haq atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Cak Thoriq mengungkapkan bahwa memang ada tambang di Pilkada. "Kalau ditanya, ada atau tidak, ya ada. Saya katakan memang ada." Jelasnya.

Penumpang gelap Pilkada tersebut menurut Cak Thoriq sebagai orang yang cerdas. " Mereka ini kalau misalnya tidak diizinkan, akan menggunakan loby loby yang sangat pintar sekali," terang Cak Thoriq.

Salah satunya menurut Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya tersebut adalah ada pihak yang ingin mengembangkan pariwisata di Lumajang. Permohonan izin wisata tersebut berada di daerah tambang. Wisata hanya wajah, dibalik kepentingan untuk mengeksploitasi tambang.

Bupati yang energik ini juga menyampaikan bahwa pemasukan dari tambang juga sedikit ke daerah. Malah lebih banyak merusak terhadap jalan yang dilalui oleh kendaraan yang mengangkut hasil tambang.

"Saya lawan itu mereka yang akan merusak alam dengan mengeksploitasi tambang. Saya tidak takut



atas ancaman mereka. Yang penting saya tulus untuk rakyat,” terangnya

Telusur Jurnalis

Jurnalis Ika Ningtiyas mengaku pernah melakukan reportase selama 10 tahun kaitan antara tambang dan Pilkada. Hasilnya lalu dibukukan dengan judul *Menambang Emas di Tanah Bencana; Liputan Mendalam Konflik Sumber Daya Alam di Pesisir Selatan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur*. “Selama 10 tahun saya fokus melakukan reportase tentang tambang dan Pilkada,” tuturnya.

Menurut Ika, pada tahun 2001 hanya ada 750 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Tetapi pada tahun 2009, sudah ada 10 ribu IUP. Di Jawa Timur saja, kata Ika terdapat pertambahan lahan secara signifikan. Pada tahun 2012, terdapat 378 IUP dengan luas lahan tambang hanya 86.904 ha. Sementara pada tahun 2016 dengan IUP 347 dengan dengan luas lahan tambang 551.694 ha.

Secara lebih spesifik, Ika menjelaskan tentang proses tambang di Tumpang Pitu Banyuwangi. Selama kurun waktu 10 tahun, Ika mencermati bahwa pada 1994 tambang tumpang pitu mengalami tsunami. Pada tahun 2005, 2010 dan 2015 dalam Pilkada di Banyuwangi terjadi pergantian izin untuk perusahaan tambang yang bisa mengeksploitasi Tumpang Pitu Banyuwangi.

Dugaan Ika, hal ini tidak bisa dipisahkan antara modal politik dengan dampak perizinan yang diberikan. “Pilkada tahun 2020 mungkinkah akan memberikan izin PT Suksesindo untuk mengeksploitasi Gunung Salakan? Kita bisa lihat bersama-sama,” pungkasnya

Ijon Politik Tambang

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menjelaskan bahwa terdapat sejumlah modus dalam ijon politik tambang. “Ada banyak sekali modus ijon politik tambang dalam Pilkada,” terang Merah.

Merah menyebutkan, ijon politik tambang ada yang menggunakan kekuasaan politik, produk kebijakan, bergaining politik, menggunakan kroni

dan dinasti politik, memberikan jaminan politik dan keamanan dan dengan menggunakan investasi.

“Mereka yang terpilih karena dibantu oleh pengusaha tambang akan memberikan izin, menyalahgunakan wewenang dan membiarkan terhadap pelanggaran,” tutur Merah. Ada lagi menurut Merah yang membagi jabatan setelah pemilu. “Ada yang diberi jatah sebagai komisaris, direktur sebagai kompensasi telah memberikan dana,” tambahnya.

Merah menyebut dari 19 Kabupaten/Kota yang akan Pilkada, ada 13 daerah di Jatim yang berpotensi untuk ada penugasan tambang yang akan memberikan modal dalam Pilkada. 13 daerah Jatim tersebut adalah Sumenep, Surabaya, Banyuwangi, Kota Blitar, Kabupaten Mojokerto, Ngawi, Tuban, Lamongan, Pacitan, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Kediri, dan Trenggalek. Untuk itulah, dalam konteks Pemilu dan Pilkada, Merah menganggap perlu menyusun regulasi pendanaan politik yang transparan dan murah. “Regulasi ini untuk memutus lingkaran setan berupa biaya politik mahal dengan menggunakan dana dari hasil tambang,” pungkasnya.

“

Saya lawan itu mereka
yang akan merusak
alam dengan
mengekploitasi tambang.
Saya tidak takut



JEDA DAN AKTIF LAGI PANWASLU AD HOC SAAT PANDEMI



Awalnya Dinonaktifkan

Pandemi Covid-19 juga berimbas pada diistirahatkannya secara nasional Badan Penyelenggara ad hoc di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa. Khusus di Jawa Timur saja tercatat sejumlah 1.158 Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dan 4.789 Pengawas Kelurahan/Desa yang tersebar di 386 Kecamatan, 439 Kelurahan dan 4.350 Desa pada 19 Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada, di nonaktifkan atau istirahatkan menjadi penyelenggara.

Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0252 tanggal 24 Maret 2020, tentang Penundaan Pengawasan Tahapan dalam Pilkada tahun 2020. Di mana diketahui keberadaan badan ad hoc di Bawaslu untuk Panwascam sudah bekerja sejak Desember 2020 atau 3 bulan sebelum pandemi Covid-19. Sedangkan untuk Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) sendiri baru sebulan dilakukan pelantikan.



Selamat kembali bekerja untuk mengawasi Pilkada 2020. Bekerja untuk mengawasi tahapan dengan sebaik-baiknya dengan tetap terus menjaga keselamatan dan kesehatan

Artinya jika tetap mengacu kepada masa kerja Pengawas Kecamatan berdasarkan tahapan Pemilihan 2020 maka masa kerja mereka tersisa 8 bulan dari total 11 bulan. Sedangkan untuk Pengawas Desa sisa kerja mereka masih 8 bulan setelah dinyatakan break sudah bekerja 1 bulan dari total masa kerja 9 bulan.

Ketua Ketua Bawaslu Jawa Timur, Moh Amin yang juga membidangi divisi SDM menyatakan, penundaan tahapan pemilihan dan penghentian sementara penyelenggara ad hoc pada keadaan pandemi baru dialami kali ini selama sejarah kepemiluan di Indonesia.

Masih kata Amin meskipun mereka berstatus off (diistirahatkan) diharapkan mereka bisa menjaga nama baik Bawaslu, sebagai lembaga independen pengawas Pemilu karena kedepannya saat pengaktifan kembali, para pengawas yang sudah dilantik harus tetap memenuhi beberapa persyaratan dalam undang-undang.

"Saat pengaktifan lagi keterpenuhan syarat masih menjadi pertimbangan, terutama syarat untuk tidak berafiliasi dengan parpol dan bakal calon," jelasnya.

Hal ini menurutnya sebagai langkah antisipasi terhadap adanya jajaran ad hoc yang telah berubah, misalnya ada yang masuk ke dalam salah satu tim sukses pasangan calon atau partai politik di daerah tertentu. Maka melanggar aturan dan harus diambil tindakan.

Diistirahatkannya badan ad hoc pengawas Pemilu ternyata juga menyiratkan berbagai cerita tersendiri, Edy Suryono, salah satu Panwascam di

Kabupaten Ponorogo menyatakan, akibat pandemi Covid mau tidak mau harus menerima putusan dari pusat. Dirinya yang kesehariannya juga sebagai MC pada hajatan ini mengaku pasrah dan hanya bisa berdoa atas pandemi covid ini agar segera berakhir.

"Semua sepi mas, kegiatan saya sehari hari sebagai MC pada hajatan juga sepi," ungkapnya.

Masih kata Edy, moment diistirahatkannya lembaga ad hoc ini dimanfaatkan olehnya untuk belajar lebih serius mengenai aturan kepemiluan. Dengan harapan nanti setelah selesai pandemi bisa digunakan bekal untuk menjalankan tugas sebagai Panwascam.

Kembali Diaktifkan

Pengawas Ad Hoc se-Jawa Timur kembali diaktifkan sejak 14 Juni 2020. Mengingat bahwa tahapan Pilkada lanjutan sudah dimulai pada 15 Juni 2020. Setidaknya 1.158 Panwascam dan 4.789 Penwaslu Desa dan Kelurahan di 19 Kabupaten/Kota yang Pilkada di Jawa Timur akan kembali bekerja.

"Selamat kembali bekerja untuk mengawasi Pilkada 2020. Bekerja untuk mengawasi tahapan dengan sebaik-baiknya dengan tetap terus menjaga keselamatan dan kesehatan," tutur Amin via online.

Pria asal Sumenep ini sebelumnya, pada Sabtu Sore (13/06) sudah memberikan arahan agar 19 Kabupaten/Kota sudah mulai menyiapkan diri mengaktifkan pengawas ad hoc yang sebelumnya di nonaktifkan. Persiapan itu menurut



Amin meliputi tentang keterpenuhan syarat dari Panwas ad hoc.

"Dilihat lagi apakah siap untuk bekerja penuh waktu mengawasi Pilkada lanjutan dan juga dipastikan agar benar benar masih cukup syarat secara administratif," terang Amin via daring.

Sebagai informasi, pengawas ad hoc dalam waktu dekat akan bekerja untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih. Khusus untuk daerah yang terdapat calon perseorangan, maka pengawas ad hoc akan terlibat dalam verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.



Saat pengaktifan lagi keterpenuhan syarat masih menjadi pertimbangan, terutama syarat untuk tidak berafiliasi dengan parpol dan bakal calon



Oleh : Hasyim Wahid, SE, MM.
Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi

PILKADA DAN OPTIMISME DI TENGAH PANDEMI

Pengawas pemilu menghadapi dilema. Satu sisi harus mengawasi Pilkada pada 09 Desember 2020 dan disisi lain harus menjaga keselamatan jiwa dari covid-19. Terdapat 270 daerah yang akan menggelar Pilkada. Terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota yang siap menyelenggarakan Pilkada, termasuk Pilkada Kota Makasar yang diulang pelaksanaannya.

Kurva kasus yang terkonfirmasi positif covid-19 belum menunjukkan tanda tanda mencapai puncak dan akan melandai. Tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti akhir pandemi. Disinilah pengawasan pemilu harus menjalankan tugas ditengah wabah. Perpu 2/2020 sudah keluar, bersamaan dengan perdebatan apakah akan ditunda atau tetap dilanjutkan 09 Desember.

Setidaknya ada tiga persoalan utama jika Pilkada serentak ini tetap dilaksanakan ditengah pandemi. Pertama, tingkat partisipasi pemilih turun. Pandemi virus corona dikhawatirkan banyak pihak akan mempengaruhi tingkat partisipasi

pemilih turun. Jika pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang, ada 105.396.460 jumlah penduduk potensial pemilih pemilu yang terlibat. Penyelenggara dituntut terus meningkatkan partisipasi ditengah pandemi. Ini bukan pekerjaan mudah.

Kedua, Support anggaran Pilkada. Dalam kondisi pandemi yang tidak menentu ini memastikan ketersediaan anggaran daerah adalah penting. Jika sebagian keuangan daerah sudah tersedot dan terpakai untuk penanganan pandemi corona, maka harus segera dicarikan solusi agar tahapan pilkada serentak 2020 bisa berjalan.

Ketiga, tahapan dengan protokol kesehatan yang ketat. Perlu penyesuaian teknis tahapan untuk menekan angka positif karena pandemi. KPU dan Bawaslu harus siap dan sigap mengeluarkan peraturan teknis yang menjawab kebutuhan lapangan. Tahap pencocokan dan penelitian pemilih sebagai contoh, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) perlu payung

hukum yang jelas untuk penyesuaian protokol kesehatan.

Selain persoalan di atas, menjadi penting untuk tetap menjaga kewarasan di tengah pandemi. Ancaman informasi tentang covid-19 yang menyerang kita juga berdampak pada psikologi. Kita akan panik, depresi dan stress. ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi di negara lain seperti Australia, ancaman stress, kepanikan ini akan berujung pada bunuh diri. Data dari Brain and Mind Centre, dari Sydney Univesity, menunjukkan bahwa 750 sampai 1500 kasus bunuh diri lima tahun mendatang di Australia.

Merawat Optimisme Pengawas Pemilu

Tidak dipungkiri, dampak yang ditimbulkan pandemi corona, membawa pengaruh dalam kerja-kerja pengawasan bagi penyelenggara pemilu khususnya anggota Bawaslu. Maka sejumlah perubahan kebijakan dan strategi kerja pengawasan perlu dirubah dan disesuaikan.

Tak kalah penting dan perlu menjadi perhatian adalah terus menjaga kesehatan mental. Menurut Guru Besar Universitas Airlangga, Abdurrahman saat wawancara dengan Kompas TV pada 19 Maret 2020, bahwa pola pikir optimis itu penting untuk meningkatkan imunitas tubuh.

Sebagai bagian dari ikhtiar tersebut, maka pengawas pemilu harus memiliki optimisme dalam menyelenggarakan pilkada dalam situasi apapun. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. *Pertama*, kita perlu menjadwalkan waktu untuk diri sendiri setidaknya 30 menit sehari. Kita bisa menjadwalkan waktu untuk diri sendiri, setidaknya selama setengah jam setiap harinya.

Kedua, fokus melakukan aktivitas yang menyehatkan. Bahwa, kebiasaan buruk sangat mudah dilakukan saat kita merasa stres atau bosan. Untuk itu, memfokuskan diri menemukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan dapat membuat kita tetap sehat serta merangsang kreativitas. Kegiatan tersebut dapat mengalihkan perhatian sementara dan membuat kita menjadi lebih tenang.

Ketiga, **tetap terhubung dengan teman dan keluarga**. Pandemi Corona telah membuat kita harus melakukan *social distancing* atau jaga jarak

sosial dan melakukan isolasi diri di rumah. Bahwa hal yang bisa membuat kita tetap merasa aman adalah dengan dikelilingi oleh teman dan keluarga.

Keempat, hindari hal-hal yang mengundang Kepanikan. Banyak orang mengatakan bahwa dirinya merasakan ketegangan dan kegelisahan yang semakin intensif saat pandemi Corona muncul. Hal itu biasanya dirasakan setelah menonton berita dan mengikuti perkembangannya di internet. Maka membatasi akses medsos dari hari-hari sebelumnya juga penting dalam situasi ini.

Kelima, membumikan optimisme. Yakni upaya mengajak semua bagian bangsa untuk Bersama sama membangkitkan rasa optimis dengan kadar berlipat lipat dan meyakini setelah masa sulit selalu ada masa menyenangkan.

Selain itu, juga diperlukan muhasabah untuk kita semua. Pemerintah harus lebih sigap, penyelenggara pemilu lebih inovatif, dunia medis harus lebih responsive termasuk para dermawan yang harus terus ikut membantu. Polisi dan tentara siap siaga mengamankan, selanjutnya Media Massa memberikan informasi edukatif, bukan malah menakut-nakuti serta yang tidak kalah penting, seluruh lapisan masyarakat harus ikut berpartisipasi membumikan rasa optimis.

Khusus Pilkada serentak, kapanpun dilaksanakan, saat pandemi masih berlangsung atau tidak, semua elemen bangsa terutama penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu harus bergandengan tangan dan saling bahu-membahu untuk melaksanakan tugas sesuai regulasi. Sikap saling menguatkan, mendukung, dan memberikan suntikan motivasi harus lebih dikedepankan bersama.

Tak boleh ada yang menggunting dalam lipatan, apalagi mencari untung dalam kesempatan. Kita jadikan momentum ini sebagai bahan introspeksi diri dan sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas kita bersama. Sikap optimisme harus dibumikan agar kita menang dan yakin jika setelah gelap selalu terbit terang.



PILKADA DAN ANAK LEMBU YANG TERBELENGGU



M. Alfianto

Kordiv. Organisasi dan Sumberdaya Manusia,
Penganggungjawab Kehumasan
Bawaslu Bojonegoro

Stop complaining!

"Said the farmer Who told you a calf to be?
Why don't you have wings to fly with
Like the swallow so proud and free?"

Bait di atas adalah sepenggal lirik lagu Dona-dona. Mendengarnya, mungkin terasa asing ditelinga kita. Memang lagu ini tidak sepopuler Kartonyono-nya Denny Caknan atau Layang Kangennya the lord of broken heart Mas Didi Kempot.

Ada beberapa hal yang bisa dijadikan alasan mengapa Dona-dona tidak sepopuler dua lagu tersebut. Pertama: lagu ini bernada minor dan cenderung kelim, kedua : usia lagu ini jauh lebih tua dari rerata usia kaum milenial saat ini, bahkan lebih uzur dari Monas sekalipun. Lirik lagu ini ditulis dalam bahasa Yiddish sekira tahun 1940-1950 dan baru populer pada 1960-an setelah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Adalah Joan Baez, penyanyi balada perempuan asal Amerika Serikat yang mempopulerkannya.

Di Indonesia lagu ini dipopulerkan oleh Sita Nursanti, dibawakannya dengan sangat apik, ia bernyanyi di bawah temeram malam dan redup cahaya lampu mercury. Dikelilingi oleh muda mudi, sembari duduk la melantunkan tiap nada diiringi petikan gitar.

Dalam adegan ini, Sita tidak terlihat sedang bernyanyi,

namun berkisah : tentang kelimnya nasib si anak Lembu yang berada dalam gerbong kereta menuju tempat pembantaian. Dari dalam gerbong yang berjalan ia mendongak ke atas dan melihat burung Layang-layang terbang di angkasa. Dikepakkannya sayap mungilnya kesana kemari, bermain dengan angin kebebasan. Seandainya bisa memilih, ia ingin menjadi burung Layang-layang, gumam penuh sesal si anak Lembu.

Anda dan saya tentu berbeda dengan anak Lembu atau juga burung Layang-layang. Selain karena kita mempunyai akal dan budi pekerti, anak Lembu juga tidak gemar mendengarkan Kartonyono Medhot Janji, tentunya. Karena dianugerahi akal inilah konon manusia memiliki kemampuan untuk dapat membedakan baik dan buruk, salah dan benar.

Tentunya dengan segala keluhuran budi pekerti yang melekat pada batin dan melembaga dalam kebudayaan hingga akhirnya menjadi sebuah peradaban. Kita juga tidak selemah anak Lembu, yang pasrah terbelenggu tidak bisa memilih, hanya bisa menunggu ajal menjemputnya. Kita, manusia bisa menentukan pilihan kita sendiri.

Pemilu, Syarat Negara Demokrasi

Dalam sejarah modern, konsep demokrasi lahir dari gagasan untuk membatasi absolutisme penguasa feodal.

fundamental guna melaksanakan Pemilu yang bebas, jujur dan adil sesuai tuntutan Reformasi. Kini tidak ada lagi pemaksaan aspirasi melalui jalur birokrasi, monopoli pers dan keberpihakan penyelenggara Pemilu.

Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu juga semakin diperkuat kewenangannya untuk mencegah, mengawasi dan menindak setiap pelanggaran dalam gelaran elektoral. Semata-mata untuk melaksanakan amanah Reformasi dalam menjamin terlaksananya Pemilu dan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pilkada, Jaga Demokrasi Tetap Lestari

Melalui surat bernomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) memutuskan untuk menunda tahapan Pilkada tahun 2020 akibat meluasnya wabah pandemi Covid-19. Hal ini selaras dengan masukan dari Bawaslu, bahwa meneruskan tahapan Pilkada 2020 ditengah wabah sangat beresiko bagi keselamatan masyarakat. Di Jawa Timur sendiri ada 19 Kabupaten/ Kota yang akan menggelar pesta demokrasi Pilkada.

Berkaca dari Pemilu 2019 dimana jumlah laporan masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran masih sangat minim, ini menjadi pekerjaan rumah bagi jajaran Pengawas Pemilu untuk menyiapkan berbagai strategi pelibatan masyarakat. Mereka harus dipantik kesadarannya, diedukasi tentang kepengawasan dan senantiasa didampingi. Merekapun harus tergerak, bahwa ini kesempatan untuk ikut terlibat dan berbakti pada daerah masing-masing melalui Pilkada.

Kita telah merasakan betapa nikmatnya kebebasan berdemokrasi, serupa burung layang-layang yang dengan sesuka hati mengepakkan sayap berterbangan diangkasa luas. Kita telah bebas dan leluasa menggunakan hak pilih dalam Pilkada nanti. Bebas berpartisipasi ikut memilih Pemimpin yang kelak mengelola APBD yang tentunya nilainya tidak sedikit.

Undang-Undang dan Negara menjamin pelaksanaannya. Namun bukan berarti kita telah sepenuhnya lepas dari belenggu-belenggu yang mengancam keberlangsungan demokrasi. Layaknya sebuah kontestasi, Pilkada selalu melahirkan kecenderungan terjadinya kecurangan. Tugas kita bersama untuk mencegah dan mengawasinya, tidak hanya Bawaslu namun masyarakat juga harus terlibat langsung agar kecurangan-kecurangan dapat dicegah, dan pelanggaran dapat direduksi.

Bagi Anda yang akan melangsungkan Pilkada, mari mulai dari diri sendiri, dengan ikut aktif bersama Bawaslu mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran, menjadi kader pengawasan partisipatif. Tolak dan laporkan segala bentuk kecurangan: politisasi bantuan kemanusiaan, politisasi SARA, politik identitas, *black campaign*, *hoax*, politik uang dan indikasi-indikasi pelanggaran lainnya. Menjaga demokrasi tetap lestari bukanlah semata ada dipundak Bawaslu, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pilihan ada ditangan Anda, memilih menjadi burung Layang-layang atau kembali menjadi anak Lembu.



Bagi masyarakat modern
demokrasi dinilai sebagai
pilihan sistem politik dan
cara pengaturan
kehidupan terbaik

Sebab kekuasaan yang tak terbatas telah menjerumuskan kepada kesewenang-wenangan, penindasan, kemerosotan ekonomi, kekacauan tatanan masyarakat, instabilitas politik, bahkan kemerosotan moral. Bahwa kekuasaan haruslah dibatasi dengan konstitusi, dan Negara serta konstitusi harus menjamin kemerdekaan individu, kesamaan hak serta hak pilih untuk semua warga Negara.

Bagi masyarakat modern demokrasi dinilai sebagai pilihan sistem politik dan cara pengaturan kehidupan terbaik. Sehingga, bahkan rezim totaliter pun tak segan menyebut dirinya demokratis demi meyakinkan masyarakat dunia serta mendapatkan pengakuan komunitas internasional.

Di Indonesia, tercatat setidaknya empat redaksi demokrasi yang pernah lahir: Demokrasi Liberal / Parleментар, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Pancasila, hingga Demokrasi Era Reformasi. Perubahan era demokrasi ini seiring sejalan dengan pergantian rezim pemerintahan. International Commision of Jurist menyatakan syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis salah satunya adalah adanya pemilihan umum yang bebas.

Dari beberapa kali gelaran pemilihan umum yang dilaksanakan, Pemilu Tahun 1955 menarik untuk kita cermati, sebab ini adalah peristiwa terbesar kedua bangsa Indonesia pasca Proklamasi. Pemilu pertama ini bisa dibilang cukup demokratis karena kontestasi peserta dinilai berimbang bahkan bisa dibilang *fairplay*.

Tidak ada mobilisasi penggunaan kekuasaan pemerintah secara masif dan sewenang-wenang untuk kemenangan peserta Pemilu atau kelompok tertentu. Antusiasme rakyat juga sangat tinggi untuk memilih, tercatat sebanyak 87% dari 43.104.464 orang menggunakan hak suaranya untuk memilih 272 kursi DPR di 95.532 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebagai eksperimen, Pemilu 1955 juga tidak

lepas dari beragam kekurangan dan kecurangan namun hal ini dipandang tidak seberapa jika dibandingkan dengan Pemilu rezim setelahnya. Orde Baru mengklaim Demokrasi Pancasila sebagai patron, banyak yang menilai dengan sebutan ini seolah-olah demokrasi Orde Barulah yang benar-benar dan paling Pancasila lalu Demokrasi sebelumnya tidak.

Dalam prakteknya rezim Orde Baru banyak dikritik karena dinilai menjalankan mekanisme kekuasaan otoriter dan menyembunyikan kecenderungan praktik a-demokratis didalamnya. Pemberlakuan Undang-Undang Pemilu Nomor 4 Tahun 1975 yang intinya peserta Pemilu harus difusi menjadi tiga kekuatan sosial politik.

Peserta Pemilu tahun 1971 yang berjumlah 10 dipaksa untuk melebur menjadi hanya 3 saja. Alih-alih melaksanakan GBHN 1973 untuk menyederhanakan jumlah peserta Pemilu, nyatanya hal ini dijadikan dalih untuk mempereteli kekuatan lawan politik penguasa dan dijadikan dasar untuk memusatkan dukungan pada satu kekuatan golongan politik pendukung pemerintah. Kemenangan-kemenangan golongan pendukung pemerintah dalam setiap Pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru nyaris selalu di atas 60%.

Banyak pihak menilai hal ini tidak lepas dari praktek-praktek a-demokratis yang disokong oleh penguasa guna melanggengkan pemerintahannya: kecurangan aparat birokrasi, pemaksaan aspirasi melalui jalur birokrasi, monopoli pers, hingga pelaksana Pemilu yang tidak adil. Hal ini dengan sendirinya telah menciptakan belenggu-belenggu kebebasan dalam kehidupan berdemokrasi bagi masyarakat. Rakyat yang seharusnya bebas memilih harus terbelenggu haknya, serupa anak Lembu di dalam gerbong kereta.

Kini era Demokrasi Reformasi, ia tumbuh dari gersang kebebasan, serupa hujan pagi hari yang turun setelah 32 tahun. Pemilu pasca Reformasi merupakan kristalisasi tuntutan perubahan dari rakyat. Pada era ini terjadi banyak perubahan

“SRIKANDI” WANITA TANGGUH PENGAWAL DEMOKRASI INDONESIA

“

Dahulu wanita dianggap sebagai seorang yang tunduk dan lemah. Ketika semua dibuka selebar-lebarnya, mulailah timbul kemerdekaan tentang kebebasan, dimana pria dan wanita mempunyai peluang yang sama dan kesempatan yang sama artinya hak atas pendidikan dan kesempatan bekerja sama



Oleh : **Dwi Endah Prasetyowati** | Anggota Bawaslu Kab. Jember

Saya adalah Dwi Endah Prasetyowati. Lahir di Jember, 12 Mei 1982 silam. Menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Jember merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Meski tidak asing dengan dunia politik dan dalam hal teknis penyelenggaraan pemilu, saya yang pada awalnya pernah menjabat sebagai Anggota komisioner KPU Kabupaten Jember ini merasa bahwa menjadi anggota Bawaslu ini adalah pertama kali dirinya bersentuhan langsung dengan isu teknis penyelenggaraan pemilu yang lebih mengarah kepada bidang pengawasan dan penindakan pelanggaran. Sehingga, ia dituntut ekstra cepat beradaptasi dengan posisinya yang baru.

Di Bawaslu Kabupaten Jember Saya dipercaya sebagai Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Pengetahuan dan Pengalaman dalam menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Jember tahun

2014-2018, sangat membantu saya dalam melakukan pengawasan secara maksimal dalam hal pengawasan, supaya pemilihan umum dapat terselenggara dengan jujur dan adil.

Ekspektasi publik terhadap Bawaslu mengenai pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan berkualitas bebas dari beragam kecurangan dan atau pelanggaran pemilu menuntut Bawaslu untuk membuktikan diri bahwa dengan kewenangan baru yang dimiliki lembaga ini akan mampu memenuhi ekspektasi publik itu. Strategi yang efektif dalam pencegahan dan pengawasan pelanggaran, penindakan pelanggaran yang profesional dan tanpa pandang bulu harus bisa dilaksanakan dan diterapkan oleh lembaga ini.

AWAL MULAI TERTARIK ISU PEMILU

Pada masa masih kuliah di Universitas Malang, saya pernah menjadi Ketua Komisi Pemilihan Fakultas (KPF) pada tahun 2002 dalam pemilihan

BEM Fakultas. Tidak hanya itu di tahun 2002-2003 saya pernah menjabat menjadi bendahara Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM). Tahun 2004 menjadi ketua KOPMA (Koperasi Mahasiswa), dan menjadi pengurus dan anggota HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) selama perkuliahan aktif juga di Muslim Study (MS).

Ketertarikan saya terhadap penyelenggara pemilu sejak berada di bangku kuliah dan setelah lulus ikut berpartisipasi menjadi anggota KPPS di tingkat desa dan banyak ikut dalam suatu organisasi seperti yang saya jelaskan diatas, dimana itu menjadi awal saya belajar tentang kepemiluan. Alhamdulillah Pada tahun 2014 di percaya menjadi Anggota KPU Kabupaten Jember untuk periode 2014-2018. Namun, di tahun 2018 saya mendaftar sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember, dan Alhamdulillah saya di percaya sebagai anggota Bawaslu Kab. Jember.

Sebagai seorang penyelenggara pemilu Kegiatan sosial yang pernah saya lakukan adalah sosialisai tentang pemilihan umum yang bertujuan antara lain memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hak mereka untuk memberikan suara memilih calon pemimpin yang akan memberikan dampak terhadap perkembangan Indonesia sekaligus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa dalam negara yang demokrasi, partisipasi rakyat sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan yang bersifat publik/umum.

Karena pada dasarnya salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu.

Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan

sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri. Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama.

SATU DI ANTARA 2 SRIKANDI BAWASLU KABUPATEN JEMBER

Dahulu wanita dianggap sebagai seorang yang tunduk dan lemah. Ketika semua dibuka selebar-lebarnya, mulailah timbul kemerdekaan tentang kebebasan, dimana pria dan wanita mempunyai peluang yang sama dan kesempatan yang sama artinya hak atas pendidikan dan kesempatan bekerja sama. Srikandi, nama itu tak asing di telinga orang Indonesia. Sehingga menjadi icon sebuah kekuatan tentang wanita yang tangguh. Hampir setiap pergolakan dan pergerakan dengan atas nama wanita, nama Srikandi ini muncul. Dan menjadi simbol kekuatan sebuah tokoh wanita.

Pada dasarnya pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi untuk memilih calon pemimpin untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menciptakan hal tersebut maka perlu terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil. Dimana tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kecurangan ataupun manipulasi sekecil apapun merupakan pelanggaran dan setiap pelanggaran harus ditindak. Oleh karena itu, dengan kepercayaan yang diberikan kepada saya sebagai salah satu Srikandi Bawaslu Kabupaten Jember siap untuk mengawal demokrasi di Indonesia.



MENJALANI TITAH MEGANG AMANAH PENYELENGGARA PEMILU MASLAHATUL UMMAH

Oleh : **Titin Wahyuningsih** | Anggota Bawaslu Kab. Pasuruan



"Tiada Tapak Yang Sia-Sia" kalimat inilah yang dijadikan penyemangat oleh perempuan berasal dari Prigen Kabupaten Pasuruan ini melangkah dalam perjalanan kariernya. Bagi perempuan kelahiran 4 September 1974 ini, semua yang dilakukan akan membawa hikmah dan merupakan tapak yang akan menentukan keberhasilan kedepannya.

Perempuan lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya yang bergelar sebagai Sarjana Agama ini melanjutkan perjalanan hidup dengan merintis lembaga Pendidikan Anak Usia Dini pada Yayasan Al Ghazali bertempat di tanah kelahirannya setelah lulusan menempuh pendidikan S1 nya. Dalam rentang waktu 12 (duabelas tahun) pada pengabdianya sebagai Pendidik berbagai prestasi telah ia torehkan diantaranya, terpilih sebagai guru Prestasi mulai ditingkat kecamatan hingga ditingkat Nasional, Kepala sekolah Prestasi

ditingkat Kecamatan hingga tingkat Nasional, Juara Keberhasilan Guru dalam Pembelajaran Nasional.

Pengembaraannya bukan hanya di dunia pendidikan saja tetapi juga melintas dalam bidang yang lain, Di tahun 2007 dunia penyelenggaraan pemilu mulai diikutinya dengan menjadi Panitia Penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan Yaitu sebagai PPK Prigen. perjalanannya menjadi penyelenggara pemilu tidak berhenti hanya sampai disitu, di tahun 2009 dia mengikuti proses seleksi sebagai anggota KPU Kabupaten di Pasuruan. Kesempatan mengemban amanah sebagai

Anggota KPU Kabupaten Pasuruan ia dapat selama dua Periode.

Mengemban amanah sebagai Anggota KPU selama dua periode, bukanlah hal mudah. Dibutuhkan kecerdasan mental, spiritual, intelektual, dan skill sehingga memiliki kepekaan dalam memahami regulasi dalam menjalani tugas-tugas kepemiluan mulai dari pelaksanaan tahapan pemilu, peningkatan partisipasi masyarakat, hingga penetapan hasil pemilu.

"Partisipasi masyarakat merupakan salah satu parameter terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, maka upaya peningkatan partisipasi masyarakat tidak bisa diabaikan" tuturnya.

Dalam mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat, di lakukan program **pendidikan pemilih sustainable** pada semua segment, antara lain dengan kegiatan berupa program KPU Goes to School dan KPU Goes To Campus yang didalamnya ada tiga program kegiatan yaitu WPP (Workshop

Pemilih Pemula), TPP (Training Penyelenggaraan Pemilu), Hingga APP (Asistensi Penyelenggaraan Pemilu) untuk pemilih Pemula, program Kegiatan Perempuan dan Pemilu untuk pemilih Perempuan hingga KPU On The Road untuk masyarakat umum telah dilakukannya. Ditahun 2018, ibu dari tiga orang anak ini, menjejakkan tapaknya di Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar lembaga memiliki tugas dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan pemilu. Bekal pengalaman sebagai anggota KPU selama dua periode, tentunya sangat membantu dalam melaksanakan tugas pengawasan.

"Tugas pengawasan berbeda dengan tugas teknis di KPU, pada tugas teknis di KPU kita banyak bergerak dengan tangan dan kaki, sementara untuk tugas pengawasan kita lebih banyak menggunakan mata dan telinga."ulasnya.

Optimalisasi tugas pengawasan ini, salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Program dalam bentuk kegiatan "**Bawaslu Mendengar**" yang dikemas dalam moment ngopi bareng, dipilih sebagai salah satu terobosan untuk mewujudkan pengawasan partisipatif, selain berbagai kegiatan dalam bentuk tatap muka yang lainnya.

Dengan bertemu masyarakat secara langsung di tempat- tempat keramaian mulai dari kampus, sekolah, lokasi Car Free Day, Tempat wisata hingga di Pasar- pasar, program Bawaslu mendengar ini dilakukan dengan tujuan mendengarkan informasi dari masyarakat terkait adanya potensi- potensi pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu serta membangun kesadaran dan keberanian masyarakat melaporkan pelanggaran pemilu yang di temui kepada Bawaslu.

"Sampai saat ini, tidak banyak masyarakat yang memiliki keberanian untuk melaporkan pelanggaran dalam pemilu, sementara kita memiliki PR besar untuk mewujudkan Pemilu yang

Bersih dari Money Politik, isu Sara dan berita Hoax" Tuturnya

Baginya, tiga pilar dalam menentukan terwujudnya pemilu yang bersih dan berintegritas, yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan pemilih. Ketiga pilar ini harus bersinergi dan memiliki pemahaman yang sama serta dapat menempatkan posisi masing- masing sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pemilu adalah gawe kita bersama, pemilu yang Bersih dan berintegritas sangat membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat **limaslahatil Ummah** (terwujudnya kabaikan untuk umat).

Rangkaian perjalanan Sebagai penyelenggara pemilu merupakan tapak menjalani titah dengan memegang amanah demi meraih berkah. Semogalah Allah Meridloi.

“

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu parameter terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, maka upaya peningkatan partisipasi masyarakat tidak bisa di abaikan
